

Polisi Tembak Polisi

Dari Halaman 1

Dia menambahkan, "Pastinya tindakannya tegas. Dalam minggu ini kami berupaya ada proses PTDH (pemberhentian tidak dengan

hormat)."

Sebelumnya, ada kejadian polisi tembak polisi di dekat Mapolsek Solok Selatan, Jumat (22/11). Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP URA menjadi korban penem-

Dipecat dan Diproses Pidana

Dari Halaman 1

memastikan pelaku akan diproses secara etik dan pidana.

"Yang jelas saya sudah perintahkan agar kasus itu diproses tuntas terhadap pelakunya. Oknum pelaku dari institusi agar ditindak tegas apakah itu diproses etik atau pidananya," kata Jenderal Sigit di Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Jumat (22/11).

Jenderal Sigit mengatakan kasus itu masih dalam penyidikan Polda Sumatera Barat dan mendapatkan asistensi langsung di Bareskrim Polri. Dia menyebut motif dari penembakan yang dilakukan pelaku sedang didalami.

"Terkait peristiwa yang terjadi saya minta untuk mendalami motifnya," ujar Jenderal Sigit.

Penembakan yang dilakukan AKP Dadang kepada AKP Riyanto terjadi dini hari tadi. AKP Dadang saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif di Polda Sumatera Barat.

Jenderal Sigit memastikan penyidikan kasus itu akan dilakukan transparan. Dia telah memberikan arahan kepada jajarannya untuk menindak tegas pelaku tanpa melihat pangkat yang melekat.

"Apalagi kalau kemudian motifnya ternyata dilakukan terhadap hal-hal yang selama ini kita anggap menciderai institusi. Jadi saya minta

Gibran Minta PPDB Zonasi

Dari Halaman 1

TANGGAPAN FORUM GURU P2G

P2G menilai pernyataan Wapres Gibran Rakabuming Raka yang akan menghapus Sistem PPDB Zonasi terkesan tergesa-gesa dan reaksioner. Menurut P2G, perlu ada kajian akademik yang objektif terkait penghapusan sistem PPB ini.

"Sejauh ini, kami dari P2G tidak melihat Mendikdasmen Abdul Muti sudah melakukan kajian dan pelibatan publik dalam diskusi yang mengundang semua unsur pemangku kepentingan pendidikan seperti: organisasi pendidikan, organisasi guru, akademisi, kampus LPTK, dan orang tua murid," ujar P2G dalam keterangan resmi yang diterima detikEdu Jumat (22/11).

Pemerintah Tetapkan Hari Libur Nasional

Dari Halaman 1

jatuh pada, Rabu, 27 November 2024.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan keputusan yang sudah diteken Presiden Prabowo Subianto tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) nomor 33 tahun 2024 tentang hari pemungutan suara Pilkada sebagai hari libur nasional.

"Keputusan ini ditandatangani presiden tanggal 21 November. Dasarnya memberikan hak pilih masyarakat. Dengan adanya Keppres itu, maka resmi hari Rabu nanti hari libur nasional dalam rangka Pilkada," kata Tito di kantor Kemenko PMK, Jumat (22/11).

Akan ada 545 daerah yang menggelar pilkada serentak 2024 di waktu yang sama. Jumlah itu terdiri dari 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

Pada tanggal tersebut, seluruh masyarakat

Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih bisa mencoblos kepala daerah pilihannya untuk memimpin pada periode 2024-2029.

Pemilihan ini ditujukan untuk memilih gubernur, wali kota, bupati, serta wakilnya di sejumlah daerah secara serentak.

Aturan mengenai hari libur saat pemilihan telah diatur dalam pasal 167 ayat 3 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan dalam pasal 84 ayat 3 UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Sebagaimana dalam kedua pasal tersebut dijelaskan, pemungutan suara dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan kebijakan libur nasional pada hari pencoblosan Pilkada 2024 yang jatuh

bakan.

URA tak terselamatkan dan meninggal dunia. Jenazah URA berada di RS Bhayangkara, Padang dan sedang dipersiapkan untuk diterbangkan pulang ke Makassar.(cnni/js)

siapapun, apapun pangkatnya, tindak tegas secara kode etik," jelas Jenderal Sigit.

Propam Mabes Polri juga telah diterjunkan dalam mengusut perbuatan pelanggaran etik dari AKP Dadang. Kapolri mengatakan pengusutan secara pidana juga beriringan sedang dilakukan.

"Propam sedang kita turunkan, yang jelas kalau hal-hal yang sifatnya bisa diproses dengan hal-hal yang bersifat etik, ini secara umum ya, ini akan kita lakukan dan tentunya semuanya bisa berjalan dengan baik. Namun terhadap pelanggaran yang tidak bisa ditolerir saya minta tindak tegas," katanya.(det/js)

di aspek apa saja.

"Jika dihapus, bagaimana sistem penggan- tinya bagaimana skema masuk sekolah negeri? Bagaimana dampak negatif terhadap pemenuhan hak-hak anak? Dampak terhadap sistem pendidikan nasional?," papar P2G.

P2G mendorong Mendikdasmen agar melibatkan partisipasi publik semua unsur pemangku kepentingan pendidikan.

"Jadi tidak bisa asal memutuskan apalagi dilakukan tergesa-gesa," tegasnya.

"P2G berharap Kemdikdasmen membuat grand design skema Penerimaan Peserta Didik Baru yang lebih berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berpihak pada seluruh anak Indonesia," sambung- nya.(det/js)

pada 27 November masih dalam tahap finalisasi. Kementerian Sekretariat Negara akan berdiskusi terlebih dulu dengan penyelenggara pemilu.

"Iya, rencananya begitu (27 November libur nasional). Saya berencana memang dalam hari-hari dekat ini akan berkoordinasi dengan teman-teman KPU dan Pak Mendagri," kata Prasetyo di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (8/11).

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan hari pencoblosan idealnya ditetapkan sebagai hari libur agar partisipasi masyarakat dalam Pilkada tinggi.

"Memang idealnya hari pencoblosan itu adalah hari libur karena untuk memberi keleluasaan kepada para pemilih untuk menggunakan hak pilihnya, supaya partisipasi politiknya tinggi. Jadi kami mengusulkan sebetulnya itu dinyatakan sebagai hari libur," kata Bima di kompleks parlemen, Selasa (12/11).(cnni/js)

hukum.

"Baik dalam konteks pidana, maupun dalam konteks disiplin dan kedinasan."

Sebelumnya, Kepala Bagian Operasi Polres Solok, Ajun Komisaris Polisi Dadang Iskandar, menembak Kepala Satuan Reserse Kriminal Ajun Komisaris Ulil Ryanto Anshari di Polres Solok Selatan, Sumatera Barat, Jumat dini hari kemarin.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, membenarkan peristiwa tersebut saat dikonfirmasi.

Menurut informasi yang diterima, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 00.43 WIB. Kejadian bermula ketika Satuan Reskrim Polres Solok Selatan melakukan penyelidikan terhadap lokasi tambang galian C ilegal dan menangkap terduga pelaku.

Ketika menuju Polres, Ulil mendapat telepon dari Dadang untuk mengonfirmasi penangkapan tersebut. Sesampainya tersangka di Polres, penyidik langsung memeriksa terduga pelaku di Ruang Reskrim Polres Solok Selatan.

Bersamaan dengan itu, Dadang mendatangi

Ulil di parkir Polres Solok Selatan, yang berada dekat ruang identifikasi Reskrim. Dadang langsung mengarahkan pistolnya ke kepala Ulil yang tengah mengambil telepon seluler di dalam mobil.

Tak lama, terdengar suara letusan dari pistol Dadang, hingga membuat sejumlah personel Polres Solok Selatan berhamburan ke luar. Mereka menemukan Ulil sudah tergeletak dengan luka tembak di bagian kepala.

Usai penembakan, Dadang sempat kabur menggunakan mobil dinasny. Walaupun, akhirnya dia menyerahkan diri Polda Sumatera Barat.

Berdasarkan hasil olah Tempat Kejadian Perkara, polisi menemukan dua butir peluru kaliber 9 milimeter yang berasal dari pistol HS dengan nomor 260139. Polisi juga menemukan tujuh butir peluru jenis yang sama dan berasal dari pistol yang sama di sekitar rumah dinas Kapolres Solok Selatan.

Sementara ini, polisi menduga motif penembakan ini karena Dadang tak senang dengan penangkapan terhadap pelaku galian C ilegal oleh Sat Reskrim Polres Solok Selatan.(tem/js)

Daftar Negara-Negara yang Siap Tangkap Netanyahu

Dari Halaman 1

"Saya memperhatikan putusan pengadilan pidana internasional yang mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Netanyahu, mantan menteri pertahanan, Tuan Gallant, dan pemimpin Hamas, Mohammed Deif," kata Borrell dalam pernyataan resmi. "Keputusan ini merupakan keputusan yang mengikat semua negara, semua negara pihak pengadilan, termasuk seluruh anggota Uni Eropa," tambahnya.

Konfirmasi dukungan juga disampaikan Menteri Luar Negeri Belanda Caspar Veldkamp di parlemen. "Belanda jelas menghormati independensi ICC dan tidak mencampuri substansi investigasi yang dilakukan ICC," kata Caspar Veldkamp di parlemen.

"Kami adalah pihak dalam Statuta Roma, dan berdasarkan Statuta Roma dan Undang-Undang Penerapan ICC, kami berkewajiban untuk bekerja sama dengan ICC, dan itu juga akan kita lakukan," kata dia menambahkan.

Diplomat utama Den Haag mengatakan pemerintah Belanda akan membatalkan semua "kontak yang tidak penting" dengan Netanyahu sebagai tanggapan terhadap keputusan ICC. Veldkamp sebelumnya dijadwalkan mengunjungi negara Yahudi itu dalam beberapa pekan mendatang.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Prancis memberi tahu AFP bahwa Paris akan memberikan tanggapan sesuai dengan undang-undang pendirian pengadilan. Hal ini meningkatkan kemungkinan bahwa Netanyahu dan Gallant dapat ditahan di Prancis.

Ketika ditanya oleh wartawan pada konferensi pers apakah Paris akan mengambil tinda-

kan untuk menangkap Netanyahu, juru bicara Christophe Lemoine menyatakan: "Ini adalah masalah yang rumit secara hukum, jadi saya tidak akan mengomentarkannya hari ini."

Kantor Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menekankan kepada harian the Telegraph bahwa London menghormati otonomi ICC, dan memuji pengadilan tersebut sebagai "lembaga kelembagaan utama untuk menyelidiki dan mengadili kejahatan paling serius dalam kaitannya dengan hukum internasional."

Menteri Luar Negeri Irlandia Micheál Martin menekankan bahwa Dublin adalah "pendukung kuat ICC". Ia mendesak negara-negara untuk "menghormati independensi dan impari- alitasnya, tanpa ada upaya yang dilakukan untuk melemahkan pengadilan."

Kantor Kehakiman Federal Swiss mengatakan pihaknya diharuskan bekerja sama dengan ICC berdasarkan Statuta Roma dan oleh karena itu harus menangkap Netanyahu atau Gallant jika mereka memasuki negara tersebut, menurut laporan Reuters.

Petra De Sutter, wakil perdana menteri Belgia, meminta negara-negara Eropa lainnya untuk "menerapkan sanksi ekonomi, meneguhkan Perjanjian Asosiasi [UE] dengan Israel dan menjunjung surat perintah penangkapan ini. "Kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan tidak bisa dibiarkan begitu saja," De Sutter, anggota Partai Hijau sayap kiri, menuduh dalam sebuah postingan di X.

Dalam Pasal 86 Statuta Roma diatur bahwa "Negara-Negara Pihak, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Statuta ini, harus bekerja sama sepenuhnya dengan Mahkamah dalam penyidikan dan penuntutannya terhadap kejahatan yang

berada dalam yurisdiksi Pengadilan."

Artinya, seluruh 124 negara anggota ICC diwajibkan oleh regulasi itu untuk menangkap dan menyerahkan setiap individu yang tunduk pada surat perintah penangkapan ICC jika mereka menginjakkan kaki di wilayah mereka. Dari jumlah anggota tersebut, 33 negara berasal dari Afrika, 19 negara Asia Pasifik, 19 negara Eropa Timur, 28 negara Amerika Latin dan Karibia, dan 25 negara Eropa Barat dan negara lain.

Sanksi bagi mereka yang tidak menangkap seseorang meskipun sudah ada surat perintah penangkapan tidak lebih dari sekedar tamparan diplomatik. Contohnya penyerahan suatu negara ke badan pengatur ICC yang terdiri dari negara-negara anggota dan akhirnya ke Dewan Keamanan PBB.

Jika ada pihak yang ditangkap, mereka akan dibawa ke Den Haag di mana mereka akan menghadapi sidang pra-peradilan di mana jaksa penuntut akan memberikan bukti yang cukup untuk membawa kasus tersebut ke pengadilan.

Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau juga mengatakan Kanada akan "mematuhi" surat perintah penangkapan ICC terhadap Benjamin Netanyahu.

"Kami membela hukum internasional, dan kami akan mematuhi semua peraturan dan keputusan pengadilan internasional," kata Trudeau dilansir media Kanada CTV News. "Inilah jati diri kami sebagai warga Kanada."

Di Washington, DC, Menteri Luar Negeri Kanada Melanie Joly mengulangi pernyataan perdana menteri tersebut. "Kita membutuhkan akuntabilitas di dunia kita, dan berdasarkan hal itu, Kanada akan mematuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian ICC," kata Joly.(rep/js)

Respon Netanyahu

Dari Halaman 1

sekutu dekatnya Amerika Serikat (AS)?

Netanyahu menggambatkan keputusan ICC sebagai "hari gelap dalam sejarah bangsa-bangsa". Ia bahkan mengirim surat perintah penangkapan tidak akan menghentikan Israel.

"Pengadilan Kriminal Internasional di Den Haag, yang didirikan untuk melindungi kemanusiaan, kini telah menjadi musuh kemanusiaan," katanya, seraya menambahkan bahwa tuduhan itu sama sekali tidak berdasar, dikutip AFP, Jumat (22/11/2024).

"Tidak ada keputusan anti-Israel yang keterlaluan yang akan mencegah kami - dan itu tidak akan mencegah saya - ntuk terus membela negara kami dengan segala cara," ujar Netanyahu dalam sebuah pernyataan video.

"Kami tidak akan menyerah pada tekanan," sumpahnya.

Serangan Israel ke Gaza dimulai sejak Oktober 2023, setelah serangan Hamas yang diklaim Tel Aviv mengakibatkan kematian 1.206 orang. Hamas sendiri berdalih serangan merupakan pembalasan atas penjajahan yang terjadi di Palestina dan serangan ke Masjid Al-Aqsa awal 2023.

Perang Israel di Gaza sendiri telah menyebabkan kematian 44.056 orang wilayah kantong itu. Sebagian besar dari mereka warga sipil, menurut angka dari kementerian kesehatan wilayah yang dikuasai Hamas yang dianggap dapat diandalkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Badan-badan PBB sebenarnya telah memperingatkan tentang krisis kemanusiaan yang parah di Gaza. Termasuk kemungkinan kelaparan, karena kurangnya makanan dan obat-obatan.

"Kejahatan fiktif," ujar Netanyahu lagi membela diri.

"Kejahatan perang yang sebenarnya, kejahatan perang yang mengerikan yang dilakukan terhadap kami dan terhadap banyak orang lain di seluruh dunia," klaimnya.

Netanyahu juga membandingkan keputusan ICC dengan menyebutnya bak "pengadilan Dreyfus zaman modern". Ini merujuk pada kasus terkenal abad ke-19 di mana kapten tentara Yahudi Prancis Alfred Dreyfus dihukum secara tidak adil atas pengkhianatan.

"Menolak dengan jijik tindakan dan tuduhan yang tidak masuk akal dan salah yang dibuat terhadapnya," sesumbarnya lagi.

"Para hakim didorong oleh

kebencian anti-Semite terhadap Israel," tudingnya.

Sementara itu, di dalam negeri Israel sendiri, Presiden Israel Isaac Herzog mengatakan ini "hari gelap keadilan". Menteri Luar Negeri Gideon Saar mengatakan ICC telah "kehilangan semua legitimasi".

Di sisi lain, pemimpin oposisi Israel Yair Lapid juga mengkritik surat perintah penangkapan tersebut. Ia menuduh pengadilan tersebut menghadihai "terorisme".

Mantan menteri pertahanan Yoav Gallant menyebutnya upaya penangkapan dirinya, presiden berbahaya. Ia tak sudi Israel dan Hamas berada di baris yang sama.

"Keputusan pengadilan di Den Haag akan diingit selamanya -- menempatkan Negara Israel dan para pemimpin Hamas yang kejam di baris yang sama," tulisnya di X.

"Keputusan tersebut merupakan preseden berbahaya terhadap hak untuk membela diri dan perang etis serta mendorong terorisme yang mematikan," ujarnya.

Meski begitu sejumlah kelompok hak asasi manusia di Israel mendukung hal ini. Termasuk komunitas Arab di Israel.

Kelompok hak asasi manusia Israel B'Tselem meminta pemerintah asing untuk menegakkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan Gallant. Menurutnya, ini menandai salah satu titik terendah dalam sejarah Israel.

"Akuntabilitas pribadi bagi para pembuat keputusan merupakan elemen kunci dalam perjuangan untuk keadilan dan kebebasan bagi semua manusia yang tinggal di antara Sungai Yordan dan Laut Mediterania," kata lembaga itu.

Partai komunis Arab yang dipimpin Israel, Hadash, menyambut baik keputusan pengadilan tersebut. Mereka menyebut Netanyahu dan Gallant melakukan "penghancuran total Gaza" dan "pembunuhan massal".

AS MENOLAK
AS sendiri menolak secara fundamental keputusan ICC. Bahkan negara itu mengaku- khawati.

"Kami tetap sangat prihatin dengan kesibukan jaksa penuntut untuk mengajukan surat perintah penangkapan dan kesalahan proses yang dirasakan yang menyebabkan keputusan ini", kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional, dikutip AFP.

"Amerika Serikat telah meng- egaskan bahwa ICC tidak memiliki yurisdiksi atas masalah ini," tambah Paman Sam.(cnbc/js)



Kejahatan Penegak Hukum

Dari Halaman 1

kelompok tertentu.

Beking oknum aparat sering kali menjadi akar dari kejahatan terorganisasi, seperti tambang ilegal, narkoba, atau korupsi. Keterlibatan aparat menciptakan jaringan kekuasaan sulit diberantas karena adanya perlindungan dari dalam.

Institusi penegak hukum harus menjalankan reformasi menyeluruh untuk memastikan integritas, mulai dari proses rekrutmen hingga pengawasan internal. Tidak boleh ada kompromi terhadap aparat yang melanggar hukum, termasuk memberikan sanksi tegas seperti pemecatan dan proses pidana. Lembaga penegak hukum harus diawasi oleh badan independen agar tidak ada penyalahgunaan wewenang.

Keajahteraan aparat perlu diperhatikan untuk mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang. Selain itu, pelatihan moral dan etika harus menjadi prioritas.

Oknum membeking kejahatan bukan hanya masalah individu, tetapi juga mencerminkan celah dalam sistem. Penanganannya membutuhkan langkah-langkah strategis, tegas, dan berkelanjutan. Keberhasilan institusi hukum sangat bergantung pada kepercayaan publik, sehingga menjaga integritas aparat adalah prioritas utama.

Dalam perspektif teori komunikasi, kasus seperti oknum penegak hukum membeking kejahatan dapat dianalisis melalui beberapa sudut pandang. Komunikasi dalam konteks ini tidak hanya mencakup interaksi verbal, tetapi juga pesan simbolis yang disampaikan oleh perilaku, struktur kekuasaan, dan respons masyarakat.

Teori Hirarki Kekuasaan (Hierarchical Communication). Kasus ini mencerminkan kegagalan komunikasi di dalam institusi penegak hukum, di mana individu atau kelompok tertentu menyalahgunakan posisi dan kewenangan untuk tujuan pribadi. Distorsi komunikasi hierarkis bisa terjadi ketika bawahan merasa takut melaporkan perilaku atasan, atau ketika struktur organisasi mendukung penyalahgunaan kekuasaan.

Keterlibatan oknum menunjukkan adanya budaya organisasi yang mungkin permisif terhadap perilaku korup. Jika organisasi tidak menegakkan nilai-nilai etika yang kuat, komunikasi internal yang mendukung transparansi dan akuntabilitas dapat terhambat.

Media massa memainkan peran besar dalam mengarahkan perhatian publik terhadap kasus ini. Jika media menyoro- ti isu ini secara terus-menerus, masyarakat akan memandangnya sebagai masalah penting, yang dapat menekan institusi penegak hukum untuk mengambil tindakan tegas.

Dalam lingkungan yang represif atau terpolarisasi, pihak-pihak yang mengetahui kebenaran (seperti kolega di institusi yang sama) mungkin memilih diam karena takut terhadap konsekuensi sosial atau profesional. Ini yang dibicarakan dalam Teori Spiral of Silence.

Dalam perspektif komunikasi interpersonal, beking kejahatan oleh oknum dapat dianalisis sebagai bentuk pertukaran sosial, di mana oknum aparat berkomunikasi dengan pelaku kejahatan dalam hubungan timbal balik (misalnya, perlindungan hukum ditukar dengan imbalan materi atau kekuasaan).

Dalam konteks ini, Teori Konstruksi Realitas Sosial, perilaku aparat yang menyimpang membentuk realitas sosial baru di mana hukum menjadi alat kekuasaan, bukan keadilan. Komunikasi yang terjadi antaroknum di dalam sistem hukum bisa menciptakan narasi bahwa perilaku menyimpang dapat diterima jika menghasilkan keuntungan pribadi.

Perspektif Komunikasi Krisis (Crisis Communication) bahwa Institusi penegak hukum menghadapi krisis reputasi akibat kasus ini. Cara mereka berkomunikasi dengan publik, seperti melalui konferensi pers atau tindakan tegas, akan memengaruhi persepsi masyarakat. Jika komunikasi krisis tidak dilakukan dengan efektif, dampaknya adalah erosi lebih lanjut terhadap kepercayaan publik.